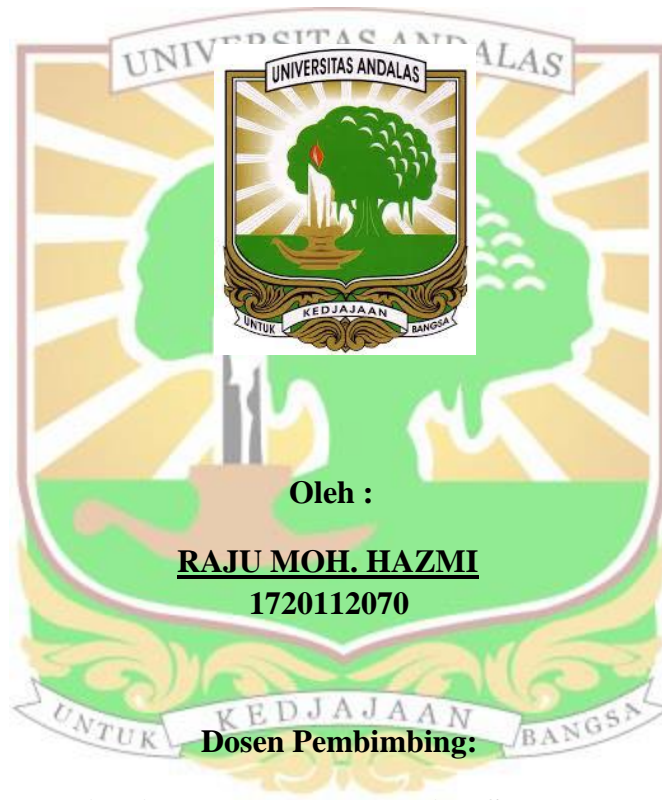


**PEMBENTUKAN DESA OLEH PEMERINTAH PUSAT UNTUK
PENATAAN DESA DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA**

TESIS

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Magister Ilmu Hukum*



Pembimbing I : Dr. Yuslim, S.H., M.H.

Pembimbing II : Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

PEMBENTUKAN DESA OLEH PEMERINTAH PUSAT UNTUK PENATAAN DESA DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA

Raju Moh Hazmi, NIM 1720112070, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 291 halaman

ABSTRAK

Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengintegrasikan desa sebagai *self governing community* dan *local self government*) dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). UU Desa juga mereposisi kedudukan desa dihadapan negara dengan spirit demokratisasi (partisipasi, akses dan kontrol). Namun, pembentukan desa oleh pemerintah pusat di wilayah perbatasan negara berdasarkan Pasal 13 UU Desa, asas yang menjadi basis dalam proses penataan desa tidak diinternalisasikan. Sehingga, dipastikan mekanisme pembentukan desa oleh pemerintah pusat kontraproduktif dengan spirit asas yang diakomodir dalam UU Desa (rekognisi dan subsidiaritas sebagai dasar kontestasi prakarsa masyarakat dalam proses pembentukan). Fokus masalah: (1) Mengapa Undang-Undang Desa memberikan kewenangan atributif pembentukan desa di wilayah perbatasan Negara kepada Pemerintah Pusat? (2) Bagaimana kewenangan dan pengaturan pembentukan oleh Pemerintah Pusat di wilayah perbatasan negara dan (3) Bagaimana pemberdayaan desa oleh Pemerintah Pusat untuk penataan desa di wilayah perbatasan negara. Jenis penelitian ini yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan sejarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Paradigma perbatasan negara sebagai wilayah yang bersifat multifaset dan konstruksi otonomi daerah NKRI disertai doktrin *ultra vires* yang menempatkan urusan konkuren pembentukan desa pada ranah kewenangan Pemerintah Pusat melalui pertimbangan kriteria urusan UU Pemda 2014 adalah *causa prima* dibalik justifikasi diletaknya kewenangan atributif pembentukan desa kepada Pemerintah Pusat. (2) Kewenangan dan pengaturan pembentukan desa oleh pemerintah pusat di wilayah perbatasan negara kontradiktif dengan asas penataan desa yang justru menempatkan rekognisi hak bawaan (*natural authority*) dan subsidiaritas pengambilan keputusan sebagai ruang kontestasi demokrasi deliberatif (prakarsa masyarakat desa/posisi entitas yang setara) dalam perspektif teori negara hukum. (3) Pemberdayaan desa oleh Pemerintah Pusat untuk penataan desa di wilayah perbatasan negara melalui program *save village* mengusung pola *central-developmentalism* pada aspek pertahanan keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Pola pemberdayaan ini tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan bersifat asimetris dan berbasis potensi lokal, sehingga fundamen pemberdayaan seharusnya memberikan ruang penguatan pada hukum adat sebagai wujud rekognisi pembangunan berbasis kewenangan yang dimiliki dari masing-masing desa tersebut. Oleh karena itu, seharusnya asas dari UU Desa menjadi pedoman bagi pembentukan desa versi Pemerintah Pusat yang justru mengonstruksikan relasi desa dan negara sebagai entitas yang setara dengan subjektivitas pengambilan keputusan berbasiskan kepentingan dari desa itu sendiri (rekognisi /subsidiaritas).

**Kata Kunci : Pembentukan Desa, Pemerintah Pusat, Wilayah Perbatasan
Negara, dan Penataan Desa**

THE ESTABLISHMENT OF VILLAGES BY THE CENTRE GOVERNMENT FOR VILLAGE DESIGNATION IN STATE BORDER AREAS

Raju Moh Hazmi, NIM 1720112070, Master of Law Study Program Postgraduate
Faculty of Law, Andalas University, 2021, 291 Page

ABSTRACT

Article 18 paragraph (7) and Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia integrate villages as self-governing communities and local self-government in Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law). The Village Law also repositions the position of villages in front of the state with the spirit of democratization (participation, access and control). However, the formation of villages by the central government in state border areas is based on Article 13 of the Village Law, the principle which is the basis for the village structuring process not internalized. Thus, it is ensured that the village formation mechanism by the central government is counterproductive with the spiritual principles accommodated in the Village Law (recognition and subsidiaritas as the basis for contesting community initiatives in the formation process). The focus of the problem: (1) Why does the Village Law give attributive authority to the formation of villages in the border areas of the State to the Central Government? (2) What is the authority and arrangement of formation by the Central Government in state border areas and (3) How is the empowerment of villages by the Central Government for village arrangement in state border areas. This type of research is juridical-normative with a statutory, conceptual, comparative, and historical approach. This research shows that (1) the paradigm of state borders as a multi-faceted region and the construction of regional autonomy of the Republic of Indonesia accompanied by the *ultra vires* doctrine which places concurrent affairs of village formation in the realm of the central government through consideration of the criteria for affairs of the 2014 Regional Government Law is the prime cause behind the justification for the placement of attributive authority, the formation of villages to the Central Government. (2) The authority and regulation of village formation by the central government in the border region of the state is contradictory to the principle of village structuring which instead places recognition of natural authority and subsidiaritas of decision making as a space for contestation of deliberative democracy (village community initiative / equal position of entity) in a rule of law theory perspective. (3) Village empowerment by the Central Government for village arrangement in state border areas through the save village program carrying a central-developmentalism pattern in the aspects of defense, security and prosperity. This empowerment pattern cannot be carried out uniformly, but is asymmetrical and based on local potential, so that the fundamentals of empowerment should provide room for strengthening of customary law as a form of recognition of development based on the authority possessed by each of these villages. Therefore, the principles of the Village Law should serve as a guideline for the formation of a village version of the central government which instead constructs village and state relations as an equivalent entity with the subjectivity of decision making based on the interests of the village itself (recognition /subsidiarity).

Keywords: Village Formation, Central Government, State Border Areas, and Village Arrangement